



**PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN**

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025**



**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanawata'la atas berkah dan rahmat-Nya hingga terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen 2025-2029. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 2025-2029 melalui pelaksanaan visi dan misi serta penetapan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program, dan kegiatan.

Kami menyadari Rencana Strategis ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Rencana Strategis ini semua kebijakan, program, dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dalam berupaya mewujudkan visi dan misi tersebut.

Kebumen, 19 September 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen



Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199303 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	3
1.3.	Maksud dan Tujuan	5
1.4.	Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN	8
2.1.	Gambaran Pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen	8
2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis BPKPD	38
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
3.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra BPKPD	55
3.2.	Strategi dan Arah Kebijakan BPKPD	57
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
4.1.	Uraian Program dan Kegiatan	59
4.2	Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	72
4.3	Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan	93
4.4	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	96
4.5	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	97
BAB V	PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai BPKPD dari Tahun 2022-2025	24
Tabel 2.2	Pegawai BPKPD Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2025	24
Tabel 2.3	Pegawai BPKPD Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025 ...	25
Tabel 2.4	Pegawai BPKPD Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025	27
Tabel 2.5	Pegawai Negeri Sipil BPKPD Berdasar Golongan Tahun 2025	28
Tabel 2.6	Sarana Prasarana BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 .	29
Tabel 2.7	Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten kebumen	32
Tabel 2.8	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD 2025-2029	32
Tabel 2.9	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2025	34
Tabel 2.10	Kelompok Sasaran Layanan BPKPD Kabupaten Kebumen	38
Tabel 2.11	Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPKPD Kebumen	40
Tabel 2.12	Permasalahan Pelayanan BPKPD berdasarkan Sasaran Renstra Kemenkeu beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	43
Tabel 2.13	Permasalahan Pelayanan BPKPD berdasarkan Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	44
Tabel 2.14	Permasalahan Pelayanan BPKPD berdasarkan Sasaran Renstra BAPENDA Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	45
Tabel 2.15	Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2025-2029	52
Tabel 2.16	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis BPKPD Kebumen	54
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2029	56
Tabel 3.2	Penahapan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen	57
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	58
Tabel 4.1	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	59
Tabel 4.2	Program Perangkat Daerah	62
Tabel 4.3	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan ...	63
Tabel 4.4	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	72
Tabel 4.5	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	93

Tabel 4.6 Rumus Indikator Tujuan dan Sasaran 95

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten
Kebumen 2025-2029 yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran JMD 96

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Kunci 97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alir dan Tata Cara Tahapan Penyusunan Renstra
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 2

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Kebumen 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen 2025-2029, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Penyusunan Renstra BPKPD disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan, Renstra BPKAD dan Renstra Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Renstra BPKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi tahapan Persiapan, Penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra hingga pada penetapan Renstra. Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.Bagan Alir dan Tata Cara Tahapan Penyusunan Renstra Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Rencana Strategis BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen) merupakan dokumen berisikan evaluasi permasalahan yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya dan analisis masalah yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis yang terjadi akhir-akhir ini. Renstra berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Isu Stategis RPJMD 2025-2029 dan isu strategis BPKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra BPKPD sehingga terjadi sinkronisasi antara dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra BPKPD. Penyusunan rencana aksi mempertimbangkan potensi sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, peralatan yang dimiliki dan potensi lain

yang ada di BPKPD. Dengan melihat potensi tersebut akan dapat mengukur kemampuan tiap tahun dalam penentuan target yang akan dicapai.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BPKPD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64,);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Wewenang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
29. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan

jangka menengah yang merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja BPKPD yang memuat sasaran dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2025-2029, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi. Renstra PD merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Merumuskan gambaran pelayanan BPKPD sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati Terpilih.
2. Memberikan arah, strategi dan kebijakan BPKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
3. Merumuskan Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKPD sebagai bahan perumusan IKU Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 5 tahun.
4. Menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang :

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum Penyusunan
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BPKPD KABUPATEN KEBUMEN

Berisi tentang :

- a. Subbab Gambaran Pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen
 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKPD

2. Sumber Daya BPKPD
3. Kinerja Pelayanan
4. Kelompok Sasaran Layanan
- b. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis BPKPD
Kabupaten Kebumen
 1. Permasalahan pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen
 2. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi tentang :

- a. Tujuan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029,
- b. Sasaran Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029,
- c. Strategi BPKPD Kabupaten Kebumen dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029,
- d. Arah Kebijakan BPKPD Kabupaten Kebumen dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada BAB ini berisi tentang :

- a. Uraian Program
- b. Uraian Kegiatan
- c. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja indikator, target, dan pagu indikatif
- d. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- e. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPD Kabupaten Kebumen
- f. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

2.1. Gambaran Pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur BPKPD Kabupaten Kebumen

A. Tugas Fungsi BPKPD Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, bahwa tugas BPKPD adalah membantu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Bedasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, BPKPD Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
- e. Pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Kebumen terdiri dari Kepala BPKPD yang memimpin melaksanakan fungsi tersebut dan membawahi Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Penunjang Urusan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, dan Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah. Struktur organisasi BPKPD Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Kebumen

Sebagaimana gambar 2.1. masing-masing unsur dalam struktur organisasi BPKPD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

(1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

(2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat memiliki 2 sub bagian dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu :

- a. Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem

pengendalian intern pemerintah, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

(3) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan penerimaan, pengeluaran, dan investasi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. Pengoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara serta kebijakan umum perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan;
- b. Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;
- d. Penyusunan Peraturan Bupati tentang teknis penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. Pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. Pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. Penyediaan anggaran kas;

- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang anggaran; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran memiliki 2 Subbidang dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

- a. Subbidang Penyusunan Bahan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Subbidang Penyusunan Bahan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta kebijakan umum perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan, penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah, penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah, penyusunan anggaran belanja Daerah, penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja Daerah, pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran belanja Daerah, dan pembinaan penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- b. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan dan pembahasan Rencana Bisnis Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(4) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi belanja dan kas daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. Pengoordinasian pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, penatausahaan pembiayaan daerah, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, dan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- b. Pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana, pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
- c. Pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan atau pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis

pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;

- e. Pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana dengan instansi terkait;
- f. Pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana restitusi atau pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Belanja memiliki 2 Subbidang dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

- a. Subbidang Belanja

Subbidang Belanja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatausahaan pembiayaan Daerah, pengkajian ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan Daerah, register pengajuan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana atas belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen Surat Perintah Membayar, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan daftar pengantar Surat Perintah Pencairan Dana serta pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana, penelitian, pengkoreksian dan pemberian persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban belanja, pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait, penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, penerbitan Surat Perintah Pembayaran atas pengembalian kelebihan penerimaan tahun berkenaan, penelitian kelengkapan dokumen Surat Keterangan Penghentian Pembayaran serta melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran,

dan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban.

b. Subbidang Kas Daerah

Subbidang Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan kas Daerah, pemindahbukuan kas Daerah, penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer Daerah sesuai dengan rekening kas umum Daerah, pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran Daerah, pemeriksaan, analisis dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan atau penerimaan kas, penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas, analisis pemberdayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan Daerah, penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas, pengelolaan utang atau pinjaman dan piutang Daerah, penyusunan laporan aliran kas secara periodik, penyusunan dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas, pengecekan pemrosesan restitusi atau pengembalian kelebihan penerimaan, pemantauan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan menyimpan uang Daerah, pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah Daerah, pemberian pinjaman atas nama pemerintah Daerah, dan penagihan piutang Daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

(5) Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Penunjang Urusan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Penunjang Urusan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi akuntansi, pelaporan dan penunjang urusan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Penunjang Urusan Keuangan Daerah mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. Koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. Konsolidasi seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- f. Rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- g. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- h. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah Daerah;
- i. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah;
- j. Verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- k. Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah;
- l. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penunjang urusan kewenangan keuangan Daerah; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Aset dan Akuntansi memiliki 2 Subbidang dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

- a. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan

Subbidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemantauan, identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan dan pengeluaran

Daerah, rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, konsolidasi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, laporan realisasi anggaran secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan), Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah, verifikasi dan pengujian atas bukti memorial, dan sinkronisasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah.

b. Subbidang Penunjang Urusan Keuangan

Subbidang Penunjang Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah, koordinasi terkait perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, pemantauan realisasi anggaran kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah, rekonsiliasi dan sinkronisasi data terkait kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah, dan penyusunan panduan teknis dan regulasi terkait kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah.

(6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, penggunaan dan penatausahaan pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan barang milik Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. Penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. Penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah;
- c. Penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan atau perawatan barang milik Daerah;
- d. Penatausahaan barang milik Daerah;
- e. Pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
- f. Pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik Daerah;
- g. Penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
- h. Koordinasi hasil penilaian barang milik Daerah;
- i. Penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
- j. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik Daerah;
- k. Penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- l. Pembinaan pengelolaan barang milik Daerah; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki 2 Subbidang dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu:

- a. Subbidang Perencanaan, Penggunaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;

Subbidang Perencanaan, Penggunaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, penelitian usulan penetapan status penggunaan barang milik Daerah, penyiapan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang

milik Daerah, pencatatan barang milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan yang diserahkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, penyiapan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah, pencatatan hasil penilaian barang milik Daerah, rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan fungsi akuntansi SKPKD, dan penyusunan laporan barang milik Daerah, penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang.

b. Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik Daerah, penyiapan konsep Surat Ijin Penghunian penggunaan rumah negara, pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik Daerah, penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang milik Daerah, penghimpun laporan hasil pemeliharaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah secara berkala, evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik Daerah, penelitian dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik Daerah, penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik Daerah, fasilitasi pengajuan usulan pemusnahan barang milik Daerah, penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan, hasil penilaian, pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah, pemanfaatan barang milik Daerah, dan penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik Daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik Daerah.

(7) Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan tentang eskensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
- d. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- f. Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- h. Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. Pengoordinasian dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- j. Pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- k. Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
- l. Pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah memiliki 2 Subbidang dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu:

- a. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;

Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan pendaftaran pajak daerah, pendaftaran, penetapan, dan penilaian pajak daerah, verifikasi perhitungan dan penetapan pajak daerah, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah (*costumer service*), pendataan, penghimpunan, pengelolaan dan pencatatan data objek pajak dan subjek pajak daerah, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah, verifikasi data kelengkapan pembayaran pajak, laporan hasil verifikasi dan hasil penetapan, penghitungan pajak daerah, melaksanakan pembinaan teknis penetapan dan verifikasi pajak daerah, pelaksanaan urusan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, pelaksanaan pelayanan pembetulan, pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan.

b. Subbidang Analisis dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Subbidang Analisis dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah, melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi, menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal, analisis regulasi pendapatan daerah, standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah, monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah, perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi, analisa potensi dan evaluasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah,

pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah, monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat.

(8) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, perencanaan dan evaluasi di bidang penagihan dan pemeriksaan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang penagihan dan pemeriksaan pendapatan daerah mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah;
- b. Pelaksanaan intensifikasi pajak daerah;
- c. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- e. Pemeriksaan pajak daerah;
- f. Pemberian pertimbangan atas pengajuan keberatan, keringanan dan pengurangan pajak daerah, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, penghapusan sanksi serta penundaan jatuh tempo,
- g. Pelaksanaan urusan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah
- h. Fasilitasi dan menjawab gugatan pajak daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah memiliki 2 Subbidang dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu:

- a. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, intensifikasi pemungutan pajak daerah, pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, penagihan dan penyusunan laporan realisasi penagihan piutang pajak daerah, penyiapan bahan penertiban dan penghapusan piutang pajak daerah, pemberian teguran keterlambatan pembayaran pajak daerah, penerbitan surat paksa kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajak daerah dan pelaksanaan penyitaan, rekonsiliasi, pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah.

b. Sub Bidang Pemeriksaan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pemeriksaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan koordinasi pemeriksaan pendapatan daerah, mengadakan pemeriksaan pajak daerah dan pendapatan daerah, memverifikasi lapangan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi serta pemberian pertimbangan atas pengajuan keberatan, keringanan dan pengurangan pajak daerah, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, penghapusan sanksi serta penundaan jatuh tempo.

2.1.2. Sumber Daya BPKPD Kabupaten Kebumen

A. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai BPKPD Kabupaten Kebumen sampai dengan bulan Agustus 2025 sebanyak 95 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 64 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 15 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 15 orang serta 36 orang tenaga petugas penunjang kegiatan atau lapangan.

Tabel 2.1
Pegawai BPKPD dari Tahun 2022-2025

No	Tahun	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
1	2022	91	67%	44	33%	135
2	2023	85	70%	36	30%	121
3	2024	79	68%	37	32%	116
4	2025	84	65%	46	35%	130

Sumber : BPKPD Kebumen, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.1, jumlah pegawai BPKPD Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi selama periode 2022–2025. Jumlah pegawai menurun dari 135 orang pada tahun 2022 menjadi 116 orang pada tahun 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 130 orang pada tahun 2025.

Dari sisi komposisi gender, pegawai laki-laki masih mendominasi di setiap tahun, dengan persentase berkisar antara 65%–70%. Namun demikian, terdapat tren peningkatan proporsi pegawai perempuan pada tahun 2025 yang mencapai 35%, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam keseimbangan gender di lingkungan BPKPD Kabupaten Kebumen.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan eselon jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan golongan dapat disajikan dalam uraian di bawah ini.

a. Eselon Jabatan

Gambaran pegawai BPKPD Kebumen berdasar eselon jabatan dapat dilihat dalam Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pegawai BPKPD Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2025

No	Uraian	Eselon			Staf	P2K	Jumlah
		II	III	IV			
1	Kepala	1					1
2	Sekretariat		1	2	11	13	27
3	Bidang Anggaran		1	2	7	1	11
4	Bidang Perbendaharaan			2	12	1	15
5	Bidang Akuntansi		1	2	8	2	13
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah		1	2	9	5	17
7	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah		1	2	7	9	19

No	Uraian	Eselon			Staf	P2K	Jumlah
		II	III	IV			
8	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah		1	2	20	5	28
Jumlah		1	6	14	74	36	131
Persentase		1%	5%	11%	56%	27%	100%

Sumber: BPKPD Kebumen, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.2, struktur kepegawaian BPKPD Kabupaten Kebumen didominasi oleh jabatan staf, yaitu sebanyak 74 orang (56%), diikuti oleh pegawai P2K sebanyak 36 orang (27%). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD sebagian besar ditopang oleh tenaga pelaksana teknis dan administratif.

Jumlah pejabat struktural relatif terbatas, dengan 1 orang Eselon II, 6 orang Eselon III (5%), dan 14 orang Eselon IV (11%), yang mencerminkan struktur organisasi yang ramping namun fungsional. Unit kerja dengan jumlah pegawai terbesar adalah Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah serta Sekretariat, yang sejalan dengan tingginya beban kerja pada fungsi pelayanan, pengelolaan pendapatan, dan dukungan administrasi.

Tingkat Pendidikan

Gambaran Pegawai BPKPD Kebumen dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Pegawai BPKPD Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1/ DIV	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	8	2	3	-	-	14
3	Bidang Anggaran	2	7	-	1		-	10
4	Bidang Perbendaharaan	2	7	1	4	-	-	14
5	Bidang Akuntansi	3	5	1	2	-	-	11
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	6	2	3	-	-	12
7	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	1	5	3	1	-	-	10

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1/ DIV	D3	SMA	SMP	SD	
8	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah	1	6	1	15	-	-	23
9	Petugas Penunjang Kegiatan Kantor dan Lapangan	-	9	7	18	2	-	36
Jumlah		12	53	17	47	2	-	130
Persentase		9,16%	40,46%	12,98%	35,88%	1,53%	0%	100%

Sumber: BPKPD Kebumen, 2025.

Berdasar Tabel 2.3 komposisi tingkat pendidikan pegawai BPKPD Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi pendidikan S1/DIV dan S2, yang secara kumulatif mencapai 49,62% dari total pegawai. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi strategis pengelolaan keuangan daerah yang menuntut kompetensi analitis, ketelitian, dan pemahaman regulasi yang tinggi.

Namun demikian, masih terdapat proporsi pegawai dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah sebesar 37,40%, yang mayoritas berada pada unit kerja operasional dan petugas penunjang. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi kebutuhan kompetensi antara fungsi strategis dan fungsi pendukung, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan peningkatan kualifikasi pendidikan.

Distribusi pegawai berpendidikan tinggi relatif terkonsentrasi pada unit kerja teknis seperti Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, dan Bidang Perbendaharaan, yang sejalan dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab pada bidang tersebut. Kondisi ini menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan SDM yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan organisasi selama periode Renstra.

Gambaran Pegawai BPKPD Kebumen berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Pegawai BPKPD Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala	1		1
2	Sekretariat	7	7	14
3	Bidang Anggaran	7	3	10
4	Bidang Perbendaharaan	9	5	14
5	Bidang Akuntansi	5	6	11
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	8	4	12
7	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	5	5	10
8	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah	19	4	23
9	Petugas Penunjang Kegiatan Kantor dan Lapangan	24	12	36
Jumlah		85	46	131
Persentase		64,89%	35,11%	100%

Sumber: BPKPD Kebumen, 2025.

Komposisi pegawai BPKPD Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pegawai laki-laki masih mendominasi, yaitu sebanyak 85 orang (64,89%), sedangkan pegawai perempuan berjumlah 46 orang (35,11%). Komposisi ini mencerminkan karakteristik tugas dan fungsi BPKPD yang sebagian membutuhkan aktivitas lapangan dan mobilitas tinggi, khususnya pada bidang penagihan dan pemeriksaan pendapatan daerah. Meskipun demikian, terdapat unit kerja dengan komposisi gender yang relatif seimbang, seperti Sekretariat serta Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, bahkan pada Bidang Akuntansi jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya peluang penguatan peran perempuan dalam fungsi-fungsi teknis dan administratif yang bersifat strategis. Sebaran gender yang bervariasi antar unit kerja menjadi dasar penting dalam perencanaan pengelolaan SDM yang berkeadilan, inklusif, dan berbasis kebutuhan organisasi, tanpa mengabaikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD Kabupaten Kebumen.

b. Pegawai berdasar Golongan

Gambaran Pegawai BPKPD Kebumen berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Pegawai Negeri Sipil BPKPD Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	GOLONGAN				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Kepala	0	0	0	1	1
2	Sekretariat	0	1	7	1	9
3	Bidang Anggaran	0	1	7	1	9
4	Bidang Perbendaharaan	0	0	10	1	11
5	Bidang Akuntansi	0	0	9	0	9
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	3	7	1	11
7	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	0	1	5	1	7
8	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah	0	6	14	2	22
Jumlah		0	12	59	8	79
Persentase		0,00%	15,19%	74,68%	10,13%	100%

Sumber: BPKPD Kebumen, 2025.

Komposisi golongan ASN BPKPD Kabupaten Kebumen menunjukkan dominasi pegawai pada Golongan III, yaitu sebanyak 59 orang atau 74,68% dari total ASN. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar ASN BPKPD berada pada fase produktif dan pelaksana utama tugas teknis pengelolaan keuangan daerah.

Pegawai dengan Golongan IV berjumlah 8 orang (10,13%), yang sebagian besar menduduki jabatan struktural dan berperan dalam pengambilan keputusan serta pembinaan organisasi. Sementara itu, Golongan II masih berjumlah 12 orang (15,19%), dan tidak terdapat ASN pada Golongan I. Struktur golongan ini menunjukkan organisasi yang relatif matang, dengan fokus utama pada penguatan kinerja teknis dan manajerial.

Sebaran golongan ASN yang relatif merata pada unit kerja teknis seperti Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Anggaran menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas yang menuntut akurasi, kepatuhan regulasi, dan profesionalisme tinggi selama periode Renstra.

B. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BPKPD Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan Jangka 5 tahun	Perlu Penambahan	Perlu Pemeliharaan	Ket
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah				
1	Gedung								
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	-	-	2	2	0	2	-
2	Kendaraan								
	Mobil	8	2	-	10	10	2	8	-
	Sepeda Motor	58	10	5	73	75	15	58	Peremajaan
3	Sarpras Elektronik								
	AC Split	50	-	6	56	56	6	50	Peremajaan
	Televisi	5	-	1	6	6	1	5	
	Wireless	6	-	-	6	6	-	6	
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	45	-	-	45	45	-	45	
	Stabilisator (stabilizer)	4	-	-	4	4	0	4	
	Camera digital	4	-	1	5	5	1	4	Peremajaan
	Dispenser	4	-	-	4	4	-	4	
	Handy Cam	-	-	2	2	2	2	-	Peremajaan
	P.C Unit	89	-	5	94	94		0	
	NoteBook	99	-	8	107	107	8	99	Peremajaan
	Ploter	1	-	-	1	1	0	1	
	Printer	72	-	6	78	78	6	72	Peremajaan
	Printronic	3	-	1	4	3	-	-	
	Scanner	10	-	-	10	10	-	-	
	Server	2	-	-	2	2	-	-	
	LCD	5	-	2	7	7	2	5	Peremajaan
	Sound System	4	-	-	4	4	-	4	-
	Telephone (PABX)	1	1	-	2	1	0	1	
	Facsimile	1	-	-	1	1	0	1	
	Pesawat Telephone	-	-	9	9	9	-	9	

No	Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan Jangka 5 tahun	Perlu Penambahan	Perlu Pemeliharaan	Ket
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah				
	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	-	-	1	2	1	1	Penambahan
4	Sarpras Kantor								
	Portable Generating Set	2	-	-	2	2	-	2	
	Portable Water Pump	2	-	-	2	2	-	2	
	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	-	-	2	2	-	2	
	Lemari Besi	12	3	-	15	20	8	12	
	Rak Besi/Metal	40	-	-	40	40	-	40	
	Rak Kayu	3	-	-	3	3	-	3	
	Filling Besi/Metal	55	-	-	55	55	-	55	
	Brankas	3	-	-	3	3	-	3	
	Lemari kayu	5	-	-	5	5	-	5	
	Papan Tulis	2	-	-	-	2	-	2	
	Perforator Besar	1	-	-	1	1	-	1	
	Kursi Besi/Metal	3	-	-	3	3	-	3	
	Meja Rapat	30	-	-	30	30	-	30	
	Meja Reseption	2	-	-	2	2	-	2	
	Meja Panjang	10	-	-	10	10	-	10	
	Kursi Rapat	150	-	-	150	150	-	150	
	Kursi Tamu	5	-	-	5	5	-	5	
	Kursi Putar	15	-	-	15	15	-	15	
	Meja Biro/ Meja Kerja	155	-	-	155	170	15	155	
	Mimbar/Podium	1	-	-	1	1	0	1	
	Timbangan Badan	1	-	-	1	1	0	1	
	Alat Pemadam Portable	30	-	-	30	30	-	30	
	Meja Kerja Pejabat	17	-	-	17	17	-	17	
	Kursi Kerja Pejabat	17	-	-	17	17	-	17	
	Kursi Kerja No Struktural	70	-	-	70	70	-	70	

Sumber: BPKPD Kebumen, 2025.

Dukungan sarana prasarana yang ada di BPKPD Tahun 2025 sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi selama ini, namun yang perlu menjadi perhatian yaitu kondisi *software* dan *hardware* perangkat pendukung kerja berupa laptop dan komputer perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Pemenuhan kebutuhan perlu untuk dicukupi sampai 5 tahun kedepan.

Penambahan dan peremajaan Sarana dan Prasarana pendukung seperti laptop dan komputer diharapkan mampu diadakan secara bertahap dari tahun ke tahun, serta peremajaan kendaraan dinas roda dua untuk petugas lapangan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan BPKPD

A. Matriks Kinerja Pelayanan BPKPD (Tujuan dan Sasaran)

Gambaran Matriks Kinerja Pelayanan BPKPD (Tujuan dan Sasaran) 4 (empat) tahun sebelumnya diperoleh dari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.7. di bawah ini.

Tabel 2.7
Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN				RASIO CAPAIAN			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indikator Tujuan:												
1.	Nilai SAKIP	67,00	69,00	71,00	74,00	65,49	66,11	66,11*	66,11*	97,75%	95,81%	93,11%*	89,34%*
2.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%*
	Indikator Sasaran :												
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	14,48%	15,13%	15,40%	15,74%	17,99%	15,98%	15,65%	15,74%	124,27%	105,63%	101,60%	100,00%*

Sumber: BPKPD Kebumen, 2024

B. Matriks Kinerja Pelayanan BPKPD (Program)

Gambaran Matriks Kinerja Pelayanan BPKPD (Program) 4 (empat) tahun sebelumnya diperoleh dari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.8. di bawah ini.

Tabel 2.8
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD 2025-2029

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi BPKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	100%	100%	100%	100%
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		100%	100%	100%	100%	102,59%	101,54%	102,17%	100%	102,59%	101,54%	102,17%	100%

Sumber: BPKPD Kebumen, 2024

Berdasar hasil capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selama 4 tahun terakhir dilihat dari Tabel 2.7 hampir setiap tahunnya dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra BPKPD Tahun 2021-2026.

Sementara itu capaian kinerja pada Tabel 2.8. Kinerja indikator program terdapat 4 program yang ada di Renstra BPKPD (2021-2026). Sebanyak 4 Program dilaksanakan dari Tahun 2022 sampai Tahun 2025. Berdasarkan hasil capaian program non akumulatif capaian Tahun 2022-2025 sebesar 100% (angka prediksi). Rata-rata capaian program adalah 100% tiap tahunnya.

2.1.4 Kinerja Keuangan BPKPD

A. Matriks Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Secara umum kinerja pendanaan BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2025 masuk dalam kategori baik. Kondisi ini menggambarkan kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran. Deviasi keuangan yang kecil menunjukkan keefektifan program di BPKPD Kabupaten Kebumen. Gambaran kinerja Keuangan BPKPD dapat dilihat pada Tabel 2.9 di bawah ini:

Tabel 2.9
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2022-2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran				Tingkat Capaian Keuangan (%)				Rata-rata pertumbuhan anggaran	Rata-rata pertumbuhan realisasi
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.017.848.000	21.045.103.000	24.132.458.000	21.517.119.080	21.256.027.880	20.063.419.760	21.923.770.132	10.126.381.710	96,54	95,34	90,85	50,32	6,64%	-20,82%
A	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	495.000.000	117.366.000	86.487.000	58.840.000	482.893.490	115.998.300	82.790.550	32.113.226	97,55	98,83	95,73	59,07	-113,26%	-14,59%
B	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	15.555.862.000	15.479.547.000	15.519.967.000	15.848.947.080	15.224.307.135	14.553.827.524	13.575.841.080	8.889.335.198	97,87	94,02	87,47	49,13	0,48%	-25,51%
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.000.000	196.724.000	20.760.000	20.760.000	142.265.300	193.483.993	14.001.798	300.000	88,92	98,35	67,45	2,68	-66,49%	-52,82%
D	Adninistrasi Umum Perangkat Daerah	610.000.000	415.554.000	336.000.000	4.000.000	588.671.645	407.274.392	328.863.373	218.300.802	96,50	98,01	97,88	64,64	-83,96%	-9,89%
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.187.600.000	3.845.312.000	7.057.605.000	4.235.000.000	3.874.399.000	3.832.834.500	6.876.656.439	84.140.000	92,52	99,68	97,44	21,10	62,03%	-20,62%
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.490.000	468.600.000	589.639.000	529.572.000	389.054.971	440.041.564	533.642.788	360.392.121	87,14	93,91	90,50	70,84	27,39%	-3,10%
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.896.000	522.000.000	522.000.000	490.000.000	554.436.339	519.959.487	511.974.104	379.134.303	98,50	99,61	98,08	52,85	-9,31	-15,78%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran				Tingkat Capaian Keuangan (%)				Rata-rata pertumb uhan anggara n	Rata-rata pertumb uhan realisasi
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.993.626.000	681.849.851.000	710.262.827.000	659.923.067.400	2.914.739.711	680.403.549.041	704.063.434.451	593787291164	97,36	99,79	99,13	85,89	11,07	-2,62%
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.291.007.000	1.013.554.000	943.869.000	907.382.000	1.260.928.811	1.007.171.206	923.435.881	436.736.964	97,67	99,37	97,84	54,24	-29,66%	-14,65%
B	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	836.569.000	625.366.000	507.274.000	506.774.000	814.471.742	602.701.332	494.749.923	244.392.839	97,36	96,38	97,53	59,31	-44,16	-12,88%
C	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	701.050.000	551.366.000	405.806.000	394.470.000	678.809.976	544.662.729	399.106.081	196.929.889	96,83	98,78	98,35	68,41	-44,68%	-8,57%
D	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	620.346.195.000	679.659.565.000	708.405.878.000	658.114.441.400	620.254.348.682	678.249.013.774	702.246.142.566	592.909.231.472	99,99	99,79	99,13	85,95	11,42%	-5,29%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.727.363.000	1.721.168.000	1.382.346.000	1.081.711.000	1.684.858.559	1.696.729.074	1.355.435.911	431.875.659	97,54	98,58	98,05	48,84	-27,29%	-16,20%
A	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.727.363.000	1.721.168.000	1.382.346.000	1.081.711.000	1.684.858.559	1.696.729.074	1.355.435.911	431.875.659	97,54	98,58	98,05	48,84	-27,29%	-16,20%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran				Tingkat Capaian Keuangan (%)				Rata-rata pertumbuhan anggaran	Rata-rata pertumbuhan realisasi
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.584.531.000	5.117.837.000	5.184.308.000	5.569.382.000	5.434.858.737	5.067.031.269	5.048.926.033	3.927.117.668	97,32	99,01	97,39	74,03	-4,58%	-7,90%
A	Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.584.531.000	5.117.837.000	5.184.308.000	5.569.382.000	5.434.858.737	5.067.031.269	5.048.926.033	3.927.117.668	97,32	99,01	97,39	74,03	-4,58%	-7,90%
	Jumlah	32.323.368.000	709.733.959.000	740.961.939.000	688.091.279.480	31.290.484.887	707.230.729.144	732.391.566.527	608.272.666.201	96,80	99,65	98,84	88,40	10,65%	-1,39%

Sumber : BPKPD Kebumen 2025 data diolah

Berdasarkan Tabel 2.9 serapan anggaran di BPKPD Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 dengan kriteria tinggi di mana tingkat serapan rata-rata 95,92%. dengan rasio tertinggi pada program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan persentase sebesar 95,54% dan rasio terendah pada program Pengelolaan Barang Milik daerah hal ini dikarenakan Tahun 2025 anggaran untuk legalisasi aset pemda (sertifikat) masih terkendala atau menunggu kesanggupan dari Kantor Kementerian ATR/BPN .

Anggaran BPKPD Kabupaten Kebumen dari Tahun 2022 sampai 2025 menunjukkan angka yang fluktuatif. Tahun 2022 anggaran BPKPD berada pada posisi terendah dengan rencana anggaran dalam APBD sebesar Rp.653.341.132.000. Realisasi anggaran dari APBD menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan di mana dari tahun 2022-2025 realisasi ada di rata-rata 95,92%

Dilihat dari kinerja BPKPD Kabupaten Kebumen dalam penyerapan anggaran menunjukkan penyerapan yang tinggi diatas 95% pertahunnya. Penyerapan anggaran terbesar di Tahun 2023 sebesar 99,65%. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran dari APBD di BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2025 masuk dalam kriteria tinggi diatas 90%.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen mencakup berbagai pemangku kepentingan yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Pihak-pihak tersebut menjadi target dari layanan yang disediakan oleh BPKPD Kabupaten Kebumen baik sebagai pengguna, mitra kerja, pengawas maupun penerima manfaat.

Pengelompokkan sasaran layanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jenis layanan yang diselenggarakan oleh BPKPD tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan mendukung tercapainya tata kelola keuangan dan pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Selain itu, pemetaan kelompok sasaran ini juga menjadi dasar dalam perencanaan strategis peningkatan kualitas pelayanan publik, penyesuaian regulasi internal, serta penguatan koordinasi lintas sektor di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kebumen. Berikut adalah kelompok-kelompok sasaran layanan BPKPD Kabupaten Kebumen :

Tabel 2.10
Kelompok Sasaran Layanan BPKPD Kabupaten Kebumen

Jenis Layanan	Sasaran Layanan
Layanan proses pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari Proses Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan Keuangan serta Pelaporan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	50 Perangkat Daerah
Pengawasan dan Audit	Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Daerah
Penyampaian SPPT PBB-P2	Desa dan Kelurahan se Kabupaten Kebumen
Pelayanan Pajak Daerah	Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Kebumen
Pelayanan Pajak BPHTB	Notaris/PPAT Kebumen
Pengelolaan Pajak Barang Jasa Tertentu Tenaga Listrik	PT. PLN Persero
Pelayanan Surat Menyurat	PT. Pos Indonesia
Pengelolaan Kas Daerah	Bank Jateng

Sumber : BPKPD Kebumen 2025.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis BPKPD

2.2.1. Permasalahan Layanan BPKPD

A. Permasalahan Layanan BPKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terdapat beberapa hal yang berimplikasi sebagai tantangan untuk meningkatkan pelayanan perangkat daerah dalam hal pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka pegawai BPKPD Kabupaten Kebumen dituntut untuk selalu mengikuti dinamika perubahan-perubahan tersebut dalam mengelola keuangan, barang milik daerah dan pendapatan daerah;
2. Tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban peajakan daerah yang belum optimal;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional dalam mendukung kegiatan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah; dan

4. Jumlah sumber daya manusia pada BPKPD Kabupaten Kebumen terbatas.

Peluang yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan pelayanan antara lain :

1. Sosialisasi secara berkesinambungan dan sistematis sampai kepada masyarakat tingkat bawah untuk mendorong peningkatan kesadaran dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan pelayanan berbasis IT yang berkelanjutan untuk pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan pendapatan daerah; dan
3. Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah (BMD).

Dari beberapa tantangan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki beberapa peluang untuk mengatasi tantangan tersebut, yaitu :

1. Luasnya kewenangan yang dimiliki;
2. Peraturan dan perundang-undangan yang mendukung pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan pendapatan daerah;
3. Sumber daya aparatur yang memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
4. Tersedianya SOP dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi.

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah perlu diidentifikasi tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Beberapa permasalahan yang menghambat target kinerja program yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Dinamisasi regulasi atas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah sehingga perlu sinkronisasi dan harmonisasi atas materi pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah yang diatur dalam beberapa peraturan sekaligus;
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengakibatkan turunnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah;
3. Perlunya pencermatan potensi PAD yang lebih komprehensif dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;

- 4. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum optimal sepenuhnya dilaksanakan sehingga kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendeapatan Asli Daerah; dan
- 5. Implementasi penatausahaan keuangan daerah dengan SIPD-RI yang belum bisa berjalan dengan optimal.

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. BPKPD Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan keuangan.

Pemenuhan sarana-prasarana penunjang kinerja BPKPD telah mencukupi namun perlu penyesuaian *software* dengan teknologi informasi 4.0 sehingga perlu pembaruan peralatan kerja untuk penyesuaian dengan teknologi informasi.

Pemetaan permasalahan pelayanan BPKPD Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPKPD Kebumen

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belum Optimalnya Proses Penyusunan APBD	• Belum optimalnya implementasi pemutakhiran oleh Kemendagri terkait Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah • Terbatasnya waktu penyusunan KUA/PPAS dengan terbitnya regulasi sebagai Pedoman Penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD • Belum optimalnya implementasi SIPD dalam perencanaan dan penganggaran • Belum optimalnya Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan pembahasan APBD • Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan SHSD • Kurang kooperatifnya SKPD dalam pengajuan usulan standar harga • Belum optimalnya implementasi Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja • Masih terbatasnya kemampuan dan jumlah Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan daerah

		Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah Belum Optimal	- Masih perlunya penyesuaian dalam pelaksanaannya serta perlu menyusun perkada baru yang mengacu pada PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah - Masih perlunya memperbarui Kartu Inventaris Barang dengan segera, mengacu pada Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah - Perencanaan kebutuhan BMD belum memperhatikan aset yang dapat dioptimalkan. Perlunya perencanaan kebutuhan BMD dengan memperhatikan ketersediaan BMD yang dapat dioptimalkan.
		Pemahaman SDM SKPD/Unit Kerja terhadap Implementasi Akuntansi berbasis aktual belum optimal	- Perlunya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM bagi pelaksana fungsi akuntansi dan penatausahaan BMD, baik di entitas SKPD maupun di entitas BPKPD. - Perlunya pemahaman dan kepedulian dari berbagai pihak dalam penatausahaan BMD dan penyusunan laporan akuntansi.
		Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Optimal	- Belum optimalnya kesiapan perbankan dalam memenuhi pelaksanaan transaksi non tunai - Belum optimalnya kesiapan pendampingan dari Kemendagri dalam proses penatausahaan agar dapat berjalan <i>real time</i> dan dapat memenuhi ketentuan syarat salur Dana Transfer yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan - Masih perlunya peningkatan kompetensi SDM, baik dari level pendidikan maupun keterampilan dan keahlian - Belum optimalnya penyaluran dana ke daerah yang diiringi dengan kesiapan SDM karena Perubahan aturan dari Pemerintah Pusat yang sangat dinamis - Kurang aktif dan responsifnya SDM dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat dan kurangnya budaya <i>value creation</i> (kreatif)
2	Masih Rendahnya Capaian Pendapatan Asli Daerah	Kurangnya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah belum optimal.
		Kurangnya Sosialisasi dan Informasi tentang pembayaran Pajak Daerah	Sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah belum optimal
		Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum memadai	Sumber daya manusia banyak yang sudah berusia 50 tahun ke atas
		Masih berefeknya dampak perekonomian dari pandemi Covid-19	Perekonomian belum sepenuhnya pulih akibat dari pandemi covid, sehingga mempengaruhi pendapatan daerah
3	Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Belum optimalnya kesiapan SDM dalam fungsi akuntansi untuk menjalankan pengelolaan BMD.	Perlu adanya Optimalisasi Peran PPK-SKPD dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan keuangan SKPD, serta Optimalisasi Peran Pejabat Penatausahaan Barang dalam melaksanakan fungsi pengelolaan BMD.

4	Belum Optimalnya Pelaksanaan Program Penunjang BPKPD Kabupaten Kebumen	Sarana dan prasarana pada BPKPD Kabupaten Kebumen kurang memadai	• Belum optimalnya pengadaan dan pemeliharaan BMD di BPKPD Kabupaten Kebumen
---	--	--	--

Sumber : BPKPD Kebumen 2025.

B. Telaah Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, BPKAD, dan BAPPENDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

a. Telaah Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan untuk Tahun 2025-2029 adalah :

Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan 5 (lima) Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan;
2. Meningkatkan kemandirian fiskal dengan optimalisasi penerimaan negara, baik dari pajak, kepabeanan, cukai, maupun pengelolaan aset negara;
3. Menjaga stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal yang kredibel dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat;
5. Mengelola utang negara secara hati-hati dan berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan fiskal;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan modern berbasis digital;
7. Mendorong inklusi keuangan dan pembiayaan inovatif termasuk pembiayaan hijau (*green finance*) dan respon terhadap tantangan global; dan
8. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM aparatur Kementerian Keuangan agar profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan.

Hasil telaahan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Permasalahan Pelayanan BPKPD berdasarkan Sasaran Renstra
Kemenkeu beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan BPKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal	Belum Optimalnya pengelolaan PAD	Terbatasnya SDM dan Sarana dan Prasarana serta kesadaran masyarakat dan wajib pajak yang dalam memenuhi kewajiban peajakannya yang belum sepenuhnya baik	• Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk memungut PDRD • Kemajuan IT • Dukungan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal

No	Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan BPKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah	Belum optimalnya Koordinasi antar perangkat daerah terkait pengelolaan keuangan daerah	Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	Penyelenggaraan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : BPKPD Kebumen, 2025.

b. Telaah Rencana Strategi BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik
- Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
- a. Terwujudnya tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sesuai kaidah perundangan.
2. Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah.
- Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
- a. Terwujudnya manajemen dan administrasi aset daerah.

Hubungannya antara Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Permasalahan Pelayanan BPKPD berdasarkan Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah BPKAD Prov.Jateng	Permasalahan Pelayanan BPKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sesuai kaidah perundangan	Belum Optimalnya tata kelola keuangan pemerintah daerah.	Terbatasnya kapasitas SDM dan Sarana dan Prasarana	• Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. • Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

2	Terwujudnya manajemen dan administrasi aset daerah	Belum optimalnya pengelolaan manajemen dan administrasi asset daerah	Terbatasnya kapasitas SDM dan Sarana dan Prasarana	• Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. • Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah
---	--	--	--	---

Sumber : BPKPD Kebumen 2025.

c. Telaah Rencana Strategi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pajak daerah
- Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
- a. Persentase peningkatan pajak daerah
2. Meningkatnya retribusi Daerah.
- Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
- a. Persentase peningkatan penerimaan retribusi dan pendapatan lain
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
- Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
- a. Nilai kepuasan masyarakat
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
- a. Nilai SAKIP perangkat daerah

Hubungannya antara Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Permasalahan Pelayanan BPKPD berdasarkan Sasaran Renstra BAPENDA Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Bapenda Prov.Jateng	Permasalahan Pelayanan BPKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pajak daerah	Belum Optimalnya penggalian potensi pajak daerah.	Terbatasnya kapasitas SDM dan Sarana dan Prasarana	• Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. • Bimtek Pengelolaan pendapatan daerah

2	Meningkatnya retribusi daerah	Belum optimalnya pengelolaan dan penggalian potensi retribusi daerah	Terbatasnya kapasitas SDM dan Sarana dan Prasarana	• Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. • Bimtek Pengelolaan Retribusi Daerah
---	-------------------------------	--	--	--

Sumber : BPKPD Kebumen, 2025.

d. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan JMD, JPD, serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatn ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan

manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RTRW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementarian ATR.

e. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kebumen (tambahkan teori tentang KLHS)

Dari hasil sinkronisasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kebumen, maka BPKPD Kabupaten Kebumen selaku pelaksana urusan pemerintahan bidang keuangan, tidak berkaitan langsung dengan KLHS dan RTRW.

f. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Berdaya”

Kebumen Beriman – Maju – Sejahtera - Berbudaya

Kebumen Berdaya memiliki makna bahwa masyarakat Kebumen harus lebih sejahtera, ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan meninggalkan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah; penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang mengedepankan sistem merit; pembangunan daerah yang berkeadilan gender, inklusif dan berwawasan lingkungan berkelanjutan; pemerataan pembangunan infrastruktur pada wilayah pinggiran dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (desa dan kawasan perdesaan); dan memiliki kekuatan nilai-nilai keagamaan dan modal sosial sebagai jatidiri masyarakat Kebumen. Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di Tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan

pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

1. **Beriman:** Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.
2. **Maju:** Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui teknokratif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.
3. **Sejahtera:** Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
4. **Berbudaya:** Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai

kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. **MISI 1:** Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial.
2. **MISI 2:** Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.
3. **MISI 3:** Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses

menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.

4. **MISI 4:** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum mudamelalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
5. **MISI 5:** Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal. Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Mendasari RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029 dengan Visi Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman, Maju dan Berbudaya, BPKPD Kabupaten Kebumen turut serta dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik. BPKPD Kabupaten Kebumen turut serta membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui teknokreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa

sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana yang masuk menjadi misi ke 4 Bupati Kebumen.

BPKPD Kabupaten Kebumen juga mendukung Program Bupati “ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif dengan selalu berupaya memastikan target pendapatan daerah dapat senantiasa tercapai guna mendukung kelancaran program unggulan Bupati Kebumen.

Tabel 2.15
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2025-2029

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi	Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program pengelolaan keuangan Daerah 3. Program pengelolaan barang milik daerah 4. Program pengelolaan pendapatan daerah	1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2.Nilai IKM Perangkat Daerah 3.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah 4.Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan ketentuan 5.Persentase capaian pendapatan daerah

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

2.2.2. Isu Strategis BPKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan BPKPD Kebumen, telaah dokumen Renstra Kemenkeu dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, isu strategis pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di BPKPD Kabupaten Kebumen 2025 - 2029 adalah pada Tabel 2.16 berikut:

Tabel 2.16
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis BPKPD Kebumen

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan BPKPD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan BPKPD Kebumen			Isu Strategis
			Global	Regional	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kapasitas pengelolaan keuangan daerah (WTP)	1. Ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat	1. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	1. Digitalisasi layanan publik dan tata kelola keuangan	1. Dinamika fiskal provinsi dan kab/kota	1. Perubahan regulasi keuangan daerah (UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD)	1. Masih adanya Ketergantungan fiskal terhadap pusat
2. Potensi Pendapatan Asli Daerah (pajak, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah)	2. Pendapatan Asli Daerah belum tergarap optimal	2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi dan transparansi	2. Tuntutan transparansi fiskal	2. Persaingan peningkatan PAD antar daerah	2. Transformasi digital sistem perpajakan daerah	2. Masih perlunya Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Daerah belum optimal
3. Aset daerah berpotensi produktif	3. Pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah belum optimal	3. Konsistensi perencanaan dan penganggaran	3. Optimalisasi aset publik berbasis kinerja	3. Digitalisasi pengelolaan aset daerah	3. Penguatan PAD melalui optimalisasi aset daerah	3. Masih perlunya pengelolaan Aset daerah yang belum produktif
4. Infrastruktur SPBE dan sistem pengelolaan keuangan daerah	4. Digitalisasi layanan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah belum terintegrasi	4. Peningkatan kualitas pelayanan public	4. Digital governance	4. Implementasi SPBE pemerintah daerah	4. Implementasi SIPD-RI dan kebijakan SPBE nasional	4. Peningkatan Tantangan digitalisasi layanan pengelolaan keuangan daerah
5. Regulasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	5. Perubahan regulasi keuangan dan perpajakan daerah yang dinamis	5. Kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik	5. Reformasi tata kelola sektor public	5. Penyesuaian kebijakan fiskal daerah	5. Harmonisasi regulasi keuangan daerah	5. Masih perlunya perubahan regulasi keuangan dan perpajakan daerah
6. Kualitas pelayanan publik bidang keuangan daerah	6. Tuntutan pelayanan pengelolaan keuangan yang cepat dan transparan	6. Pelayanan publik yang berkeadilan dan responsive	6. Good governance	6. Meningkatnya ekspektasi masyarakat	6. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik	6. Peningkatan Tuntutan pelayanan pengelolaan keuangan yang cepat dan transparan

Sumber : BPKPD Kebumen, 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen adalah **Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah**. Tujuan dan sasaran yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Adapun sasaran yang akan dicapai BPKPD adalah **meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel serta meningkatnya pendapatan asli daerah yang berkualitas**.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPD Kabupaten Kebumen dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi awal		Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi akhir RPJMD (akhir 2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	15,43	15,43	17,00	17,25	17,50	17,75	18,00	18,00
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah yang efisien dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	72,25	72,25	73,00	74,00	76,00	77,00	78,00	78,00
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	%	4,40	4,40	4,50	4,50	4,60	4,60	4,70	4,70
		yang berkualitas	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,40	0,60	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,65

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan BPKPD

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan dasar tata kelola pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah melalui penataan data, penyempurnaan sistem informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penertiban administrasi aset sebagai fondasi penguatan kinerja fiskal daerah.	Peningkatan integrasi dan konsolidasi sistem pengelolaan keuangan daerah, perpajakan daerah, dan manajemen aset, disertai penguatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah guna mengurangi ketergantungan fiskal terhadap transfer pemerintah pusat.	Optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan aset berbasis digital melalui penguatan pengendalian internal serta pengembangan inovasi layanan perpajakan daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja fiskal.	Penguatan inovasi dan kualitas pelayanan publik di bidang keuangan dan perpajakan daerah yang sepenuhnya berbasis digital, didukung peningkatan transparansi pengelolaan APBD serta percepatan pemanfaatan aset daerah secara produktif dan berkelanjutan	Perwujudan kemandirian fiskal daerah melalui konsolidasi seluruh capaian pembangunan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, pemanfaatan aset strategis, serta penguatan tata kelola keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sumber : BPKPD Kebumen 2025.

Arah kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keteaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Keterkaitan rumusan antara tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan secara singkat dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Operasinalisasi NPSK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis program Pembangunan yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	
	Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi dan integrasi antar perangkat daerah dalam perencanaan dan penganggaran melalui pemanfaatan SIPD-RI secara optimal guna menjamin konsistensi dokumen perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	
	Peningkatan kemandirian Pembangunan melalui pengelolaan pendapatan daerah berbasis ekstensifikasi dan intensifikasi	Optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berbasis data dan digitalisasi	

Sumber : BPKPD Kebumen, 2025.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa ataukesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 4 program dan 13 kegiatan dan 54 sub kegiatan diharapkan program-program ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2. Evaluasi kinerja perangkat daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan bahan logistik kantor 2. Barang cetakan dan penggandaan 3. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4. Penyediaan bahan material 5. Penyelenggaraan rapat koordinasi

			dan konsultasi SKPD 6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan 2. Pengadaan mebel 3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pelayanan umum
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 6. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
		2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Pihak Ketiga 3. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait 4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 5. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 2. Konsolidasi Laporan Keuangan

			SKPD,BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota 4. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
		4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah 3. Pengamanan Barang Milik Daerah 4. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah 2. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 4. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah 5. Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah 6. Penetapan wajib pajak daerah 7. Penagihan pajak daerah 8. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 9. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sumber : BPKPD Kebumen 2025.

Tabel 4.2
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.02 - KEUANGAN				757.591.777.809		761.506.033.766		763.127.930.446		765.508.719.166		765.838.371.520	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.076.593.943		21.530.596.144		21.801.774.415		22.823.006.913		23.209.915.811	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,6	70,03	21.076.593.943	71,27	21.530.596.144	72,51	21.801.774.415	73,76	22.823.006.913	75,00	23.209.915.811	5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	89,63	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				730.673.183.866		734.083.421.763		735.164.990.031		736.530.788.521		736.418.259.502	
Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	95	95,4	730.673.183.866	95,6	734.083.421.763	95,8	735.164.990.031	96	736.530.788.521	96,2	736.418.259.502	5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				992.000.000		981.240.000		1.201.952.000		1.037.178.928		1.057.122.507	
Meningkatnya tata kelola Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan ketentuan (%)	100	100	992.000.000	100	981.240.000	100	1.201.952.000	100	1.037.178.928	100	1.057.122.507	5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				4.850.000.000		4.910.775.859		4.959.214.000		5.117.744.804		5.153.073.700	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Capaian Pendapatan Daerah (%)	102,4	100	4.850.000.000	100	4.910.775.859	100	4.959.214.000	100	5.117.744.804	100	5.153.073.700	5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Tabel 4.3
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan tata kelola keuangan daerah				Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Derajat Otonomi Fiskal Daerah	
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien dan Akuntabel			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang berkualitas			Tingkat Pertumbuhan PAD	
					Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang urusan penunjang pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Meningkatnya tata kelola keuangan daerah		Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
				Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

				Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
				Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
				Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
				Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
				Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang disusun	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
				Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

					Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
				Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
				Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
				Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
				Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

				Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
				Tersusunnya Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
				Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

				Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
			Meningkatnya tata kelola Barang Milik Daerah		Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
				Meningkatnya tata kelola Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan	Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Penyusunan Standar Harga
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah
				Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan		Persentase Capaian Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
				Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jenis Pajak Daerah yang dikelola	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

				Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
				Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
				Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
				Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah
				Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah
				Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sumber : BPKPD Kebumen, 2025.

4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Tabel 4.4
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				757.591.777.809		761.506.033.766		763.127.930.446		765.508.719.166		765.838.371.520
5,02	KEUANGAN				757.591.777.809		761.506.033.766		763.127.930.446		765.508.719.166		765.838.371.520
5,02,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.076.593.943		21.530.596.144		21.801.774.415		22.823.006.913		23.209.915.811
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	76,60	76,70		76,75		76,80		76,85		76,90	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Indeks)	89,63	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				101.000.000		100.420.000		106.079.951		105.080.400		105.080.400
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat D a e r a h (D e n g a n Satuan:Dokumen)	10	10		10		10		10		11	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				70.000.000		70.000.000		73.827.551		72.828.000		72.828.000
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	5		5		5		5		6	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)											
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31.000.000		30.420.000		32.252.400		32.252.400		32.252.400
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	5		5		5		5		5	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.995.777.917		18.467.148.972		18.981.416.687		19.869.999.297		20.266.043.853
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12		12		12		12		12	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.845.777.917		18.317.148.972		18.831.416.687		19.719.999.297		20.116.043.853
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	92	92		92		92		92		92	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12		12		12		12		12	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000		101.600.000		102.232.000		103.232.000		103.232.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Dengan Satuan:Orang)	92	92		92		92		92		92	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000		101.600.000		102.232.000		103.232.000		103.232.000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Dengan Satuan:Orang)	92	92		92		92		92		92	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				489.000.000		495.180.000		500.667.600		513.667.600		499.727.200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12		12		12		12		12	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.000.000		18.360.000		18.727.200		18.727.200		18.727.200
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		1	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				160.000.000		163.200.000		166.464.000		166.464.000		160.000.000
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12		12		12		12		12	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000		40.800.000		40.800.000		40.800.000		40.000.000
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12		12		12		12		12	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.000.000		7.140.000		7.282.800		7.282.800		7.000.000
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang D i s e d i a k a n (D e n g a n Satuan:Dokumen)	12	12		12		12		12		12	
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				80.000.000		81.600.000		83.232.000		83.232.000		80.000.000
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		1	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000		180.000.000		180.000.000		193.000.000		190.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4.000.000		4.080.000		4.161.600		4.161.600		4.000.000
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				291.638.185		464.149.331		262.445.536		301.628.535		253.728.867
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Unit)	12	12		12		13		13		11	
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				86.638.185		359.149.331		157.445.536		156.992.979		129.093.311
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	3		4		5		5		4	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				20.000.000		20.000.000		20.000.000		24.635.556		24.635.556

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	4		4		4		4		4	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				85.000.000		85.000.000		85.000.000		120.000.000		100.000.000
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	4		4		4		4		3	
5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		0		0		0		0
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1		0		0		0		0	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.424.177.841		1.401.397.841		1.391.499.841		1.413.966.281		1.418.590.002
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang urusan penunjang pemerintah daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12		12		12		12		12	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.100.000		5.202.000		5.306.040		5.412.161
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan	12	12		12		12		12		12	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Satuan:Laporan)											
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				310.000.000		316.200.000		316.200.000		322.524.000		325.000.000
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.109.177.841		1.080.097.841		1.070.097.841		1.086.136.241		1.088.177.841
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				675.000.000		500.700.000		457.432.800		515.432.800		563.513.489
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Unit)	62	62		62		62		62		62	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				240.000.000		241.640.000		246.372.800		251.372.800		250.000.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	40	40		40		40		40		40	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		59.060.000		61.060.000		64.060.000		65.000.000
	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	20	20		20		20		20		20	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				375.000.000		200.000.000		150.000.000		200.000.000		248.513.489
	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2		2		2		2		2	
5,02,02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				730.673.183.866		734.083.421.763		735.164.990.031		736.530.788.521		736.418.259.502
	Meningkatnya tata kelola Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan	95,00	95,40		95,60		95,80		96,00		96,20	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Daerah (Dengan Satuan:Persen)											
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				862.000.000		874.440.000		875.256.000		1.136.518.400		897.015.848
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran dan R e g u l a s i (D e n g a n Satuan:Dokumen)	11	11		11		11		11		11	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				120.000.000		120.000.000		120.000.000		122.000.000		120.000.000
	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				70.000.000		71.400.000		71.400.000		71.400.000		72.828.000
	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				276.000.000		279.120.000		279.120.000		281.120.000		286.342.400
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	2	2		2		2		2		2	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penjabaran APBD	Penjabaran APBD (Dengan Satuan:Dokumen)											
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				241.000.000		245.820.000		245.820.000		250.736.400		255.751.128
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				115.000.000		117.300.000		117.300.000		369.646.000		119.646.000
	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				0 40.000.00		40.800.000		41.616.000		41.616.000		42.448.320
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1		1		1		1		1	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				523.000.000		528.740.000		528.740.000		536.740.000		546.674.800
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	287	287		287		287		287		287	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				158.000.000		161.160.000		161.160.000		161.160.000		164.383.200
	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	221	221		221		221		221		221	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				95.000.000		94.540.000		94.540.000		98.540.000		100.110.800
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoton gan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan	41	41		41		41		41		41	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Ketiga (PFK)	Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Dengan Satuan:Laporan)											
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				82.000.000		81.280.000		81.280.000		85.280.000		86.585.600
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dengan Satuan:Dokumen)	22	22		22		22		22		22	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan				108.000.000		110.160.000		110.160.000		110.160.000		112.363.200

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan												
	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3		3		3		3		3	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				80.000.000		81.600.000		81.600.000		81.600.000		83.232.000
	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	100	100		100		100		100		100	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				394.700.000		400.234.000		400.234.000		411.918.680		419.757.054
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	20	20		20		20		20		20	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Tepat Waktu (Dengan Satuan:Dokumen)											
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				79.000.000		80.580.000		80.580.000		82.191.600		83.835.432
	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Dengan Satuan:Laporan)	17	17		17		17		17		17	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				59.700.000		58.534.000		58.534.000		63.384.680		64.252.374
	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Dengan Satuan:Laporan)	1	1		1		1		1		1	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan				85.000.000		86.700.000		86.700.000		88.434.000		90.202.680

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota												
	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				91.000.000		92.820.000		92.820.000		94.676.400		96.569.928
	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	50		50		50		50		50	
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD				80.000.000		81.600.000		81.600.000		83.232.000		84.896.640

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kabupaten/Kota												
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Dengan Satuan:Lembaga)	37	37		37		37		37		37	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				728.893.483.866		732.280.007.76 3		733.360.760.031		734.445.611.441		734.554.811.800
	Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	3	3		3		3		3		3	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				707.703.572.400		710.025.611.80 0		710.025.611.800		710.029.611.800		710.029.611.800
	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1		1		1		1		1	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000
	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Dengan Satuan:Laporan)	1	1		1		1		1		1	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				19.189.911.466		20.254.395.963		21.335.148.231		22.415.999.641		22.525.200.000
	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	1		1		1		1		1	
5,02,03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				992.000.000		981.240.000		1.201.952.000		1.037.178.928		1.057.122.507
	Meningkatnya tata kelola Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				992.000.000		981.240.000		1.201.952.000		1.037.178.928		1.057.122.507
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13		14		13		13		13	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga				84.000.000		85.680.000		87.393.600		87.393.600		89.141.472
	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah				314.000.000		304.980.000		504.980.000		324.980.000		331.079.600

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	3		4		3		3		3	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah				398.000.000		390.660.000		405.660.000		418.473.200		426.442.664
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4		4		4		4		4	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				116.000.000		118.320.000		120.686.400		123.100.128		125.562.131
	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5		5		5		5		5	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				80.000.000		81.600.000		83.232.000		83.232.000		84.896.640
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100		100		100		100		100	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)											
5,02,04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				4.850.000.000		4.910.775.859		4.959.214.000		5.117.744.804		5.153.073.700
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Capaian Pendapatan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	102,4	100		100		100		100		100	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				4.850.000.000		4.910.775.859		4.959.214.000		5.117.744.804		5.153.073.700
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jenis Pajak Daerah yang dikelola (Dengan Satuan:Jenis)	8	8		8		8		8		8	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				115.000.000		110.000.000		124.040.000		126.120.800		128.243.216
	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8		8		8		8		8	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				890.000.000		900.000.000		905.000.000		927.800.000		935.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	2		2		2		2		2	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				45.000.000		40.600.000		46.212.000		51.212.000		51.836.240
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Unit)	3	3		3		3		3		3	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				115.000.000		102.000.000		104.040.000		126.120.800		128.243.216
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	8	8		8		8		8		8	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah				380.000.000		387.600.000		395.352.000		403.259.040		411.324.221
	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1398345	1398345		1399000		1399500		1400000		1400500	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah				3.100.000.000		3.179.575.859		3.190.000.000		3.258.500.000		3.270.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8		8		8		8		8	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				100.000.000		102.000.000		104.040.000		106.120.800		108.243.216
	Terlaksannnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				65.000.000		59.000.000		60.020.000		72.020.000		73.060.400
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4		4		4		4		4	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				40.000.000		30.000.000		30.510.000		46.591.364		47.123.191
	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4		4		4		4		4	
TOTAL:				757.591.777.809		761.506.033.766		763.127.930.446		765.508.719.166		765.838.371.520	

Sumber : BPKPD Kebumen 2025.

4.3. Sub Kegiatan dalam Rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menyusun subkegiatan prioritas yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Subkegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional dan berkelanjutan. Seperti yang ditampilkan pada table 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	

			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Tata kelola barang milik daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga Penatausahaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	

		intensifikasi pendapatan	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Penagihan Pajak Daerah	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

Sumber : BPKPD Kebumen 2025.

Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Indikator kinerja mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk dapat menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja akan memberikan tanda program atau kegiatan mana yang telah tercapai dan program/kegiatan yang belum tercapai. Dengan adanya tanda ini akan memudahkan untuk melakukan tindakan berikutnya sehingga kinerja yang ditetapkan dapat semua tercapai sesuai dengan target. Indikator kinerja BPKPD Kabupaten Kebumen 2025 - 2029 setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan target yang akan dicapai.

Tabel 4.6
Rumus Indikator Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Rumus
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Rasio antara Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah dikali 100%
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengukuran kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kesesuaian perencanaan dan

		penganggaran, pengalokasian anggaran belanja, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini BPK atas LKPD.
4	Tingkat Pertumbuhan PAD	Perbandingan antara realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun N dengan Realisasi PAD Tahun Sebelumnya N-1 dikali 100%
5	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Perbandingan antara realisasi Penerimaan Pajak Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Sumber : BPKPD Kebumen 2025.

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bagian ini menjelaskan target pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU menjadi tolak ukur utama keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah seperti yang disajikan pada Tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen
2025 – 2029 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran JMD

NO	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indikator Tujuan								
a	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
b	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	15,43	17,00	17,25	17,50	17,75	18,00	
2	Indikator Sasaran (IKU Urusan Keuangan)								

a	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	72,25	73,00	74,00	76,00	77,00	78,00	
b	Tingkat Pertumbuhan PAD	%	4,40	4,50	4,50	4,60	4,60	4,70	
c	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,40	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bagian ini memaparkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan perangkat daerah, seperti yang disajikan pada Tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
a.	Keuangan								
1	Persentase Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	31,62	32,75	31,45	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15,43	15,749	17,00	17,25	17,50	17,75	18,00
3	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	96,37	96,40	96,45	96,50	96,55	96,60	96,65
4	persentase penambahan Nilai aset tetap	Persen	6,55	6,60	6,65	6,70	6,75	6,80	6,85
5	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persen	12,96	13,61	14,29	15,00	15,75	16,54	17,37
6	Persentase penurunan SILPA	Persen	-12,92	-10,00	-9,00	-8,00	-7,00	-6,00	-5,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi BPKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah teilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan Rencana Strategis BPKPD Tahun 2025-2029 sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam hal mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendaptan Daerah Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah teilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

A. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan kerja Tahun 2025 dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan Tahun 2025, maka dokumen ini tetap menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan Tahun 2026 adalah program transisi karena program tersebut adalah program sementara sebelum ditetapkan rencana strategis yang baru yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah Periode Tahun 2025-2029. Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dan JP Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selama kurun waktu

Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkewajiban melaksanakan program-program dalam rencana strategis dan JMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi beedoman pada rencana strategis dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diwajibkan menjabarkan rencana strategis ini ke dalam rencana kerja tahunan;
4. Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Kebumen, 19 September 2025

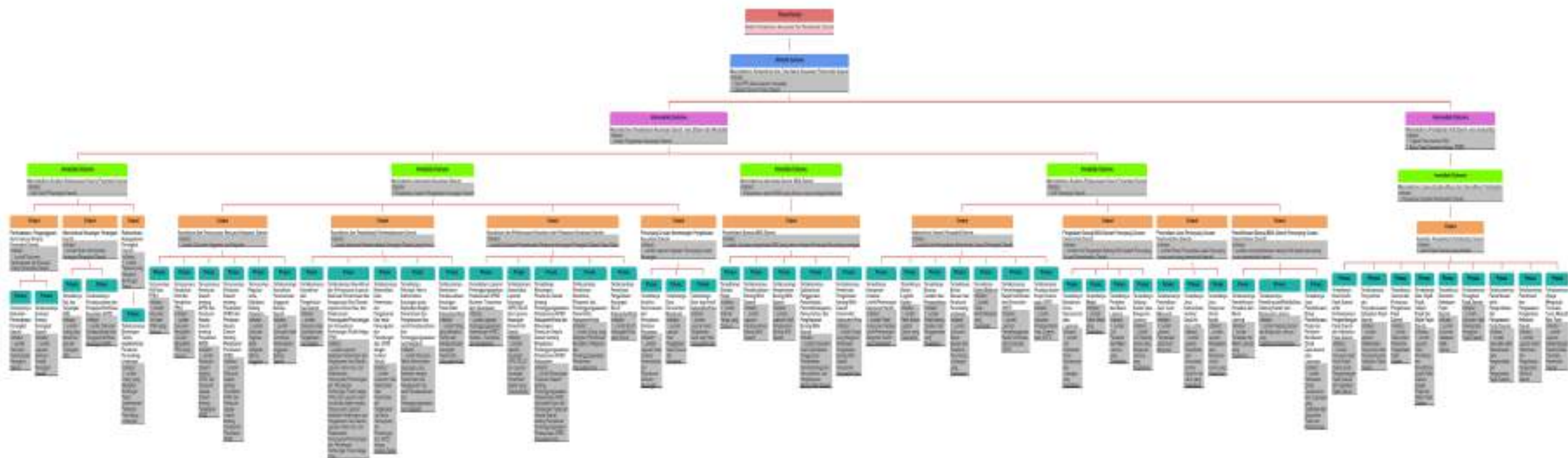
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen



Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19740529 199303 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Agus Setyaningrum	
Hantera Matlideni	

LAMPIRAN



CASECADING

Berikut Penjabaran Keuaran Dan Pendapatn Daerah

↓

Sasaran Daerah

Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

2026-08-11

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			757.591.777.809		761.506.033.766		763.127.930.446		765.508.719.166		765.838.371.520		
5.02	KEUANGAN			757.591.777.809		761.506.033.766		763.127.930.446		765.508.719.166		765.838.371.520		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.076.593.943		21.530.596.144		21.801.774.415		22.823.006.913		23.209.915.811	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	76,60	76,70		76,75		76,80		76,85		76,90		Sekretariat
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Indeks)	89,63	90,40		90,45		90,50		90,55		90,60		Sekretariat
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				101.000.000		100.420.000		106.079.951		105.080.400		105.080.400	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	10	10		10		10		10		11		Perencana / Ketua Tim Perencanaan
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				70.000.000		70.000.000		73.827.551		72.828.000		72.828.000	Perencana / Ketua Tim Perencanaan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5		5		5		5		6		Perencana / Ketua Tim Perencanaan
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31.000.000		30.420.000		32.252.400		32.252.400		32.252.400	Perencana / Ketua Tim Perencanaan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	5		5		5		5		5		Perencana / Ketua Tim Perencanaan
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.995.777.917		18.467.148.972		18.981.416.687		19.869.999.297		20.266.043.853	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.845.777.917		18.317.148.972		18.831.416.687		19.719.999.297		20.116.043.853	Kepala Subbagian Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	92	92		92		92		92		92		Kepala Subbagian Keuangan
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Kepala Subbagian Keuangan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Keuangan
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000		101.600.000		102.232.000		103.232.000		103.232.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Dengan Satuan:Orang)	92	92		92		92		92		92		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000		101.600.000		102.232.000		103.232.000		103.232.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	92	92		92		92		92		92		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				489.000.000		495.180.000		500.667.600		513.667.600		499.727.200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.000.000		18.360.000		18.727.200		18.727.200		18.727.200	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				160.000.000		163.200.000		166.464.000		166.464.000		160.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000		40.800.000		40.800.000		40.800.000		40.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4		4		4		4		4		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.000.000		7.140.000		7.282.800		7.282.800		7.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material				80.000.000		81.600.000		83.232.000		83.232.000		80.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000		180.000.000		180.000.000		193.000.000		190.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4.000.000		4.080.000		4.161.600		4.161.600		4.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				291.638.185		464.149.331		262.445.536		301.628.535		253.728.867	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Unit)	12	12		12		13		13		11		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				86.638.185		359.149.331		157.445.536		156.992.979		129.093.311	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	3		4		5		5		4		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				20.000.000		20.000.000		20.000.000		24.635.556		24.635.556	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	4		4		4		4		4		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				85.000.000		85.000.000		85.000.000		120.000.000		100.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	4		4		4		4		3		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		0		0		0		0	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1		0		0		0		0		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.424.177.841		1.401.397.841		1.391.499.841		1.413.966.281		1.418.590.002	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang urusan penunjang pemerintah daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.100.000		5.202.000		5.306.040		5.412.161	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				310.000.000		316.200.000		316.200.000		322.524.000		325.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.109.177.841		1.080.097.841		1.070.097.841		1.086.136.241		1.088.177.841	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				675.000.000		500.700.000		457.432.800		515.432.800		563.513.489	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Unit)	62	62		62		62		62		62		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				240.000.000		241.640.000		246.372.800		251.372.800		250.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	40	40		40		40		40		40		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		59.060.000		61.060.000		64.060.000		65.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	20	20		20		20		20		20		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				375.000.000		200.000.000		150.000.000		200.000.000		248.513.489	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2		2		2		2		2		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				730.673.183.866		734.083.421.763		735.164.990.031		736.530.788.521		736.418.259.502	
	Meningkatnya tata kelola Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	95	95,40		95,60		95,80		96,00		96,20		Kepala Badan
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				862.000.000		874.440.000		875.256.000		1.136.518.400		897.015.848	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11		11		11		11		11		Kepala Bidang Anggaran
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				120.000.000		120.000.000		120.000.000		122.000.000		120.000.000	Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran
	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2		Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				70.000.000		71.400.000		71.400.000		71.400.000		72.828.000	Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran
	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2		Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				276.000.000		279.120.000		279.120.000		281.120.000		286.342.400	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2		Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				241.000.000		245.820.000		245.820.000		250.736.400		255.751.128	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2		Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				115.000.000		117.300.000		117.300.000		369.646.000		119.646.000	Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran
	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2		Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				40.000.000		40.800.000		41.616.000		41.616.000		42.448.320	Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				523.000.000		528.740.000		528.740.000		536.740.000		546.674.800	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	287	287		287		287		287		287		Kepala Bidang Perbendaharaan
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				158.000.000		161.160.000		161.160.000		161.160.000		164.383.200	Kepala Subbidang Kas Daerah
	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	221	221		221		221		221		221		Kepala Subbidang Kas Daerah
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				95.000.000		94.540.000		94.540.000		98.540.000		100.110.800	Kepala Subbidang Kas Daerah

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Dengan Satuan:Laporan)	41	41		41		41		41		41		Kepala Subbidang Kas Daerah
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				82.000.000		81.280.000		81.280.000		85.280.000		86.585.600	Kepala Subbidang Belanja
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dengan Satuan:Dokumen)	22	22		22		22		22		22		Kepala Subbidang Belanja
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				108.000.000		110.160.000		110.160.000		110.160.000		112.363.200	Kepala Subbidang Belanja
	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3		3		3		3		3		Kepala Subbidang Belanja
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				80.000.000		81.600.000		81.600.000		81.600.000		83.232.000	Kepala Subbidang Belanja
	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	100	100		100		100		100		100		Kepala Subbidang Belanja
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				394.700.000		400.234.000		400.234.000		411.918.680		419.757.054	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu (Dengan Satuan:Dokumen)	20	20		20		20		20		20		Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				79.000.000		80.580.000		80.580.000		82.191.600		83.835.432	Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan
	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Dengan Satuan:Laporan)	17	17		17		17		17		17		Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				59.700.000		58.534.000		58.534.000		63.384.680		64.252.374	Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan
	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Dengan Satuan:Laporan)	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				85.000.000		86.700.000		86.700.000		88.434.000		90.202.680	Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan
	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2		Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				91.000.000		92.820.000		92.820.000		94.676.400		96.569.928	Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan
	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	50		50		50		50		50		Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				80.000.000		81.600.000		81.600.000		83.232.000		84.896.640	Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Dengan Satuan:Lembaga)	37	37		37		37		37		37		Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				728.893.483.866		732.280.007.763		733.360.760.031		734.445.611.441		734.554.811.800	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	3	3		3		3		3		3		Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				707.703.572.400		710.025.611.800		710.025.611.800		710.029.611.800		710.029.611.800	Kepala Subbidang Penunjang Urusan Keuangan
	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbidang Penunjang Urusan Keuangan
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	Kepala Subbidang Penunjang Urusan Keuangan
	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Dengan Satuan:Laporan)	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbidang Penunjang Urusan Keuangan
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				19.189.911.466		20.254.395.963		21.335.148.231		22.415.999.641		22.525.200.000	Kepala Subbidang Penunjang Urusan Keuangan
	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	1		1		1		1		1		Kepala Subbidang Penunjang Urusan Keuangan
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				992.000.000		981.240.000		1.201.952.000		1.037.178.928		1.057.122.507	
	Meningkatnya tata kelola Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kepala Badan
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				992.000.000		981.240.000		1.201.952.000		1.037.178.928		1.057.122.507	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Dengan Satuan:Dokumen)	13	13		14		13		13		13		Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga				84.000.000		85.680.000		87.393.600		87.393.600		89.141.472	Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2		Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah				314.000.000		304.980.000		504.980.000		324.980.000		331.079.600	Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	3		4		3		3		3		Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah				398.000.000		390.660.000		405.660.000		418.473.200		426.442.664	Kepala Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4		4		4		4		4		Kepala Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				116.000.000		118.320.000		120.686.400		123.100.128		125.562.131	Kepala Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5		5		5		5		5		Kepala Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				80.000.000		81.600.000		83.232.000		83.232.000		84.896.640	Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	100	100		100		100		100		100		Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				4.850.000.000		4.910.775.859		4.959.214.000		5.117.744.804		5.153.073.700	
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Capaian Pendapatan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	102,4	100		100		100		100		100		Bidang Perbendaharaan
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				4.850.000.000		4.910.775.859		4.959.214.000		5.117.744.804		5.153.073.700	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jenis Pajak Daerah yang dikelola (Dengan Satuan:Jenis)	8	8		8		8		8		8		Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				115.000.000		110.000.000		124.040.000		126.120.800		128.243.216	Kepala Subbidang Analisa dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8		8		8		8		8		Kepala Subbidang Analisa dan Evaluasi Pendapatan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				890.000.000		900.000.000		905.000.000		927.800.000		935.000.000	Kepala Subbidang Analisa dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	2		2		2		2		2		Kepala Subbidang Analisa dan Evaluasi Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				45.000.000		40.600.000		46.212.000		51.212.000		51.836.240	Kepala Subbidang Analisa dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Unit)	3	3		3		3		3		3		Kepala Subbidang Analisa dan Evaluasi Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				115.000.000		102.000.000		104.040.000		126.120.800		128.243.216	Kepala Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	8	8		8		8		8		8		Kepala Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah				380.000.000		387.600.000		395.352.000		403.259.040		411.324.221	Kepala Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1398345	1398345		1399000		1399500		1400000		1400500		Kepala Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah				3.100.000.000		3.179.575.859		3.190.000.000		3.258.500.000		3.270.000.000	Kepala Subbidang Penagihan Pajak
	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8		8		8		8		8		Kepala Subbidang Penagihan Pajak
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				100.000.000		102.000.000		104.040.000		106.120.800		108.243.216	Kepala Subbidang Pemeriksaan Pendapatan Daerah
	Terlaksannanya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		2		2		2		2		Kepala Subbidang Pemeriksaan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				65.000.000		59.000.000		60.020.000		72.020.000		73.060.400	Kepala Subbidang Pemeriksaan Pendapatan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4		4		4		4		4		Kepala Subbidang Pemeriksaan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				40.000.000		30.000.000		30.510.000		46.591.364		47.123.191	Kepala Subbidang Analisa dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4		4		4		4		4		Kepala Subbidang Analisa dan Evaluasi Pendapatan Daerah
			TOTAL:	757.591.777.809		761.506.033.766		763.127.930.446		765.508.719.166		765.838.371.520		

Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
a.	Keuangan								
1	Persentase Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	31,62	32,75	31,45	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15,43	15,749	17,00	17,25	17,50	17,75	18,00
3	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	96,37	96,40	96,45	96,50	96,55	96,60	96,65
4	persentase penambahan Nilai aset tetap	Persen	6,55	6,60	6,65	6,70	6,75	6,80	6,85
5	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persen	12,96	13,61	14,29	15,00	15,75	16,54	17,37
6	Persentase penurunan SILPA	Persen	-12,92	-10,00	-9,00	-8,00	-7,00	-6,00	-5,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 2Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon(0287) 381051,
Faksimile+62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 700 / 07254 / 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Pejagoan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Oktober 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen,



Aden Andri Susilo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 700 / 07254 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	DEFINISI OPERASIONAL
1	TUJUAN				
1.1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Formulasi Pengukuran: Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	Opini BPK Atas Laporan Keuangan adalah penilaian atau pendapat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait kewajaran penyajian laporan keuangan yang disusun oleh entitas negara, seperti kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Opini ini merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi pemerintahan, serta mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

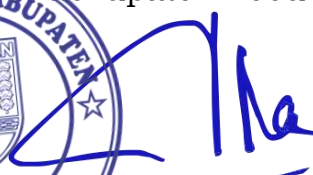
NO	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	DEFINISI OPERASIONAL
		Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Persen	Formulasi Pengukuran: Rasio antara Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD Tahun n) dibagi Total Pendapatan Daerah Tahun n x 100. Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Derajat Otonomi Fiskal Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanja dan menjalankan fungsi pemerintahan dengan mengandalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), dibandingkan dengan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.
2	SASARAN				
2.1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Formulasi Pengukuran: Pengukuran kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kesesuaian perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini BPK atas LKPD. Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar pengelolaan keuangan yang baik (<i>good governance</i>), mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	DEFINISI OPERASIONAL
		Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Persen	Formulasi Pengukuran: Perbandingan antara realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun n dibagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun n dikali 100 Tipe pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data: Badan Pengeloan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dan Badan Pusat Statistik.	Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak dari aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayahnya. Rasio ini menggambarkan tingkat kapasitas fiskal, kemandirian penerimaan pajak, serta efektivitas pemungutan pajak daerah terhadap besaran ekonomi daerah. Rasio ini mengukur proporsi nilai Pajak Daerah dibandingkan dengan total nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam periode tertentu.
2.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang berkualitas	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	Formulasi Pengukuran: Perbandingan antara realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun n dikurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) n-1 dibagi Realisasi PAD Tahun n-1 dikali 100 Tipe pengukuran : Non Kumulatif	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan atau peningkatan (<i>growth</i>) kemampuan pemerintah daerah dalam penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun.

NO	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	DEFINISI OPERASIONAL
				Sumber Data: Badan Pengeloaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.	

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen,




Aden Andri Susilo



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 000.8/00030 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;
- b. dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

- 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Wewenang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2045;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7);
 23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
 - b. menyusun dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan;
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen



Aden Andri Susilo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR : 000.8/00030 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
7.	Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	

8.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
----	--	---------	--

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen



Aden Andri Susilo

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
 KEBUMEN
 NOMOR : 000.8/ 00030 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA STRATEGIS BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
 KEBUMEN TAHUN 2025-2029

SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua	Dedy Prayogi, S.E.
2.	Kepala Subbagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
3.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	
4.	Perencana Ahli Pertama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Nurhayati, S.E.
5.	Pranata Komputer (CJFT) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Anggota	Akhmad Nur Prasetya Ginanjar, S.Kom

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
 dan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kebumen



Aden Andri Susilo

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Aula Akuntabilitas BPKPD Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 :

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada dictum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 20 Maret 2025
Kepala Perangkat Daerah
selaku pimpinan sidang
BPKPD Kabupaten Kebumen



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.	Bambang S	Unsur Legislatif	Ketua Komisi C DPRD Kebumen	
2.	Hartari	Unsur Perangkat Daerah	Bappeda Kabupaten Kebumen	
3.	Agus R	Unsur Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Kebumen	
4.	Wahyudi	Unsur Kecamatan	Kecamatan Karangsambung	
5.	Adimas Wahyu	Unsur Masyarakat	Notaris/PPAT	

DELEGASI BPKPD KABUPATEN KEBUMEN PADA MUSRENBANG RPJMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Herniyatun	Delegasi BPKPD Kabupaten Kebumen	Universitas Muhammadiyah Gombong	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311,
Telepon (0287) 381051, Faksimile +62287 384546,
Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id, Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

Kebumen, 19 Maret 2025

Nomor : 000 / 246 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
3. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Kamis /20 Maret 2025
waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
tempat : Aula Akuntabilitas BPKPD Kabupaten Kebumen, Jalan Pahlawan Nomor 2
Kebumen
acara : Forum Perangkat daerah dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2025-
2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
keterangan : Materi Dapat diakses melalui link <https://bit.ly/materiforumBPKPD>

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197405291993031001

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
3.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
7.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
9.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
10.	Camat Gombong
11.	Camat Karangsambung
12.	Camat Prembun
13.	Universitas Putra Bangsa
14.	Seluruh Pejabat Struktural di Lingkungan BPKPD Kabupaten Kebumen
15.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen Bapenda Prov Jateng
16.	Notaris/PPAT Adimas Wahyu Widayat, S.H, M.Kn
17.	Notaris/PPAT Evaristus Ratri Kartika, S.H
18.	Ketua LSM Formasi
19.	Kepala Desa Gemeksekti
20.	Kepala Desa Lembupurwo
21.	Trio Azana Style Hotel (Wajib Pajak Hotel)
22.	PT. Pesta Pora Abadi (Mie Gacoan Kebumen)
23.	Hotel Candisari Kebumen
24.	Universitas Muhammadiyah Gombong
25.	Kepala Desa Lembupurwo Kec. Mirit
26.	Kepala Desa Gemeksekti Kec. Kebumen



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Akuntabilitas BPKPD Kabupaten Kebumen Jalan Pahlawan
Nomor 2 Kebumen
Acara : Forum Perangkat daerah dalam rangka penyusunan Renstra Tahun
2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Amel	BPKPD	1.
2	Hans S	BPKPD	2.
3	Vodo H	BPKPD	3.
4	Arni	BPKPD	4.
5	Brian A	BPKPD	5.
6	Agus Riandi	IRDA	6.
7	Bambang S		7.
8	Arman H	BPKPD	8.
9	Puteh S	BPKPD	9.
10	Agus Fendi R	BPKPD	10.
11	Abidin	Kec. Prembon	11.
12	Hari Bud S	BPKPD	12.
13	Fery Farzan	BPKPD	13.
14	Martia		14.
15	Indah Susi Trisanti	Disparbud	15.
16	Wasiman	Disparbud	16.
17	Kristiana M	BPKPD	17.
18	Hentari	BPKPD	18.

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
19	Rahma W	Supra	19.
20	Adhinar	Notaris/PPAT	20.
21	Winar. Arudin	Dirkes. pp kb	21.
22	Eny H.	BPKPD	22.
23	Endra. W	BPKPD	23.
24	W. Muro	DPUPR	24.
25	Wahyus	Kor. k. tmls	25.
26	KARIKO	notaris	26.
27	Wahyus B	Gubernur	27.
28	Dese Purwanto	Disperindagkulkem	28.
29	Supripta	BPKPD	29.
30	Kusumoningtyar R	BPKPD	30.
31	M. Eny apat	BPKPD	31.
32	Wandini. SP	UPB	32.
33	Umi Hajarohun	Distibporm	33.
34	Dini	DCHBP	34.
35	Wahyus B	DLHK	35.
36	Yuni Farah A.M		36.
37	Hernigahun	UNIMUGO	37.
38	Sri Wahyus	BPKPD	38.
39	Sri Pambela	Disperindagkulkem	39.
40	Umi Juli	Dinas PMD.	40.
41	M. Iqbal	UPPD Kon	41.
42	Wahyus Azziz	Dinas Azziz	42.
43	Endah Wahyus	BPKPD	43.
44	Dodo Pray	BPKPD	44.
45	SUBANDINI	BPKPD	45.
46	Carlianti	- - -	46.

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
47	4015		47.
48	Aris. m f	BPKPD	48.
49	Warigam		49.
50	Arjar		50. 21
51	Arni		51.
52	Pramono		52.
53	Hany Fatmawati	BPKPD	53.
54	Khoerul A		54.
55	Lini Mazuloh		55.
56	Erni Astuti	BPKPD	56.
57	M. Kusmaeni		57.
58	Honeliyanto		58.
59	Inam		59.
60	Agus Supriyanto	BPKPD	60.



Dedy Prayogi, S.E.
NIP. 19880427 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pahtawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384548, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

NOTULA

- Sidang/Rapat** : Forum Perangkat daerah dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2025- 2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
- Hari/Tanggal** : Kamis, 20 Maret 2025
- Surat Undangan** : 000/246/2025
- Waktu Sidang/Rapat** : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
- Acara** : Forum Perangkat daerah dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2025- 2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
- Pimpinan Sidang/Rapat**
- Ketua** : Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
- Sekretaris** : Haris Setyawan, S.Kom., M.S.E.
- Pencatat** : Dedy Prayogi, S.E.
- Peserta Sidang/Rapat** : 1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan;
3. Terlampir
- Kegiatan Sidang/Rapat** : Per tanggal 20 Maret 2025, terdapat 66 desa yang sudah lunas PBB. BPKPD Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 ini memiliki program unggulan baru yaitu peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Kanal podcast "PakDe Berbicara". Di Jawa Tengah sendiri baru 3 kabupaten yang sudah menerapkan KKPD dan Kabupaten Kebumen juga akan segera menerapkannya. Podcast "PakDe Berbicara" rencananya akan mengunggah podcast dengan tema THR dan tambahan SILTAP setelah bupati melakukan konferensi pers. THR sendiri nantinya akan diberikan kepada PNS, P3K, P2K, dan tenaga *outsourcing*. Sementara tambahan SILTAP akan diberikan kepada perangkat desa.

Terdapat 8 jenis pajak daerah Pada proyeksi pendapatan pajak daerah Kabupaten Kebumen 2026-2030 yaitu PBB, BPHTB, PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, opsen PKB, dan opsen BBNKB. Selama tahun 2026-2030 untuk PBB tidak terdapat kenalkan NJOP, namun akan dilakukan perbaruan keadaan di lapangan seperti tanah yang semula kosong namun saat ini sudah terdapat bangunan di

alasnya. Berkaitan dengan pajak hotel dan pajak hiburan, perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak sebagai upaya peningkatan kunjungan ke Kebumen. BPKPD berharap melalui Komisi C DPRD dapat mengundang Samsat untuk melakukan diskusi bersama agar target dapat tercapai.

Dalam Renstra BPKPD disampaikan adanya usulan pemecahan dinas menjadi 2 dinas, yaitu Bapenda dan BPKAD, di mana usulan ini merupakan program dari bupati dan wakil bupati periode sebelumnya. Usulan ini sudah disampaikan kepada bupati dan wakil bupati terpilih saat ini, namun belum ada diskusi lebih lanjut. Selain itu terdapat pula usulan gedung baru yang rencana akan digunakan untuk menyimpan kendaraan-kendaraan yang sudah tidak terpakai. BPKPD dalam renstra juga mengajukan pembangunan ruang rapat di lantai 2 untuk kantor Jalan Indrakila.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen dalam sambutannya menyampaikan bahwa kontribusi pendapatan daerah masih kecil sekali bahkan belum mencapai 20% yang artinya Kabupaten Kebumen masih bergantung pada sumber-sumber pendapatan dari pusat. Di sisi lain, kemampuan keuangan daerah kita selalu dalam posisi tinggi dan kita harus terus berupaya menjaga kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kebumen tetap dalam posisi tersebut. Perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik agar dapat menentukan serta memanfaatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai modal kerja pembangunan Kebumen.

SESI DISKUSI

1. Universitas Muhammadiyah Gombong

- a. Berdasarkan paparan yang disampaikan, mengapa rencana anggaran untuk rapat koordinasi banyak sekali?
- b. Sebelumnya disampaikan bahwa tidak ada kenaikan NJOP, namun beberapa tahun kemarin terjadi kenaikan NJOP sekitar 300%.
- c. Berkaitan dengan sertifikasi tanah memang menguntungkan masyarakat karena prosesnya gratis, namun di sisi lain juga pajaknya menjadi lebih mahal.
- d. Barang bekas kendaraan yang nilai ekonomisnya sudah 0, apakah tidak bisa dibuat berita acara untuk pemusnahan atau diserahkan ke sekolah seperti SMK untuk bahan ajar?
- e. Apakah tidak ada biaya pemeliharaan kendaraan?

Tanggapan :

- a. Sifat dari rapat koordinasi ini yaitu menyelenggarakan dan menghadiri undangan. BPKPD sendiri lebih banyak menghadiri undangan daripada menyelenggarakan rapat koordinasi. Selain itu, di dalam

sub kegiatan rapat koordinasi terdapat rekening perjalanan dinas, makan minum rapat, dan lain-lain. Kami berusaha mengupayakan rapat secara *online*, namun terdapat beberapa yang memang harus dilakukan secara tatap muka seperti rapat rekonsiliasi, rapat permasalahan barang milik daerah, dan lain sebagainya.

- b. Kenaikan NJOP dapat dilakukan secara parsial dan massal. Kenaikan NJOP secara massal terjadi 1 kali setiap 3 tahun. Kenaikan parsial ternyata manakala terdapat perbaruan seperti dari tanah kosong menjadi bangunan atau perbaruan lainnya. Kenaikan sebesar 300% tersebut kemungkinan merupakan kenaikan secara parsial.
- c. Sertifikasi tanah secara gratis dilakukan melalui program PTSL. Dalam pelaksanaannya juga harus mengundang desa dan panitia pengukuran tanah.
- d. Barang milik daerah ketika sudah tidak digunakan untuk menunjang kegiatan akan dilakukan penilaian terhadap barang tersebut. Barang yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dijual kembali. Pemberian kendaraan bekas ke sekolah seperti SMK dilakukan secara selektif, karena kewenangan untuk SMA/SMK ada di provinsi. Namun sebelumnya sudah ada permintaan kendaraan bekas dari SMK di Kabupaten Kebumen dan sudah didistribusikan ke sekolah yang bersangkutan.
- e. Setiap tahun selalu ada anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas.

2. Kecamatan Karangsambung

- a. Capaian PBB Kecamatan Karangsambung tidak pernah 100%. Hal ini karena beberapa kasus yang terjadi di lapangan seperti wajib pajak sudah membayar PBB melalui perangkat desa, namun ternyata uang tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi terlebih dahulu. Kami menyarankan untuk adanya pembayaran dengan metode lain serta edukasi kepada masyarakat terkait hal tersebut.
- b. Apakah memungkinkan apabila kecamatan juga menerima insentif PBB?
- c. Kecamatan Karangsambung memiliki 2 bangunan bekas kantor Kecamatan Karangsambung dan bekas rumah dinas camat. Kedua bangunan ini terletak di posisi yang strategis dan saat ini Pemerintah Desa Karangsambung tengah meminta agar bangunan tersebut dihibahkan kepada desa. Mohon untuk ditindaklanjuti apakah akan dihibahkan kepada desa atau akan dikelola oleh pemerintah daerah.

- d. Selain itu, di Kecamatan Karangsambung juga terdapat tanah kosong yang luas. Sebelumnya terdengar adanya rencana pembangunan terminal di tanah tersebut, namun hingga kini belum terlaksana. Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Kecamatan Karangsambung mengusulkan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen untuk dibangun rumah sakit tipe D di tanah tersebut. Hal ini dikarenakan akses masyarakat Kebumen bagian utara menuju faskes rujukan yang berlokasi di Kecamatan Kebumen, Kecamatan Sruweng, dan Kecamatan Gombang cukup jauh.

Tanggapan :

- a. Metode pembayaran PBB sudah tercantum dalam SPPT. BPKPD tidak pernah memerintahkan untuk membayar kepada perangkat desa, karena perangkat hanya bertugas menyampaikan SPPT kepada wajib pajak. BPKPD juga bekerja sama dengan Bumdes untuk pembayaran PBB agar lebih memudahkan masyarakat. BPKPD pernah mengadakan lomba konten edukasi pembayaran PBB sebagai salah satu cara menyampaikan metode pembayaran PBB kepada masyarakat.
- b. Insentif PBB untuk kecamatan akan coba untuk dikaji karena sebenarnya yang berhak menerima insentif PBB adalah OPD pengampunya. BPKPD akan mencoba berkoordinasi dengan dinas-dinas yang membantu seperti inspektorat apakah dapat diberikan insentif atau penghargaan dalam bentuk lainnya kepada pihak-pihak yang secara tidak langsung membantu dalam pemungulan PBB seperti kecamatan. Sebelumnya telah diberikan penghargaan dalam bentuk stimulan BBM.
- c. Bangunan bekas rumah dinas camat di Kecamatan Karanganyar tidak akan diserahkan kepada desa karena regulasinya yang tidak memungkinkan. BPKPD bekerjasama dengan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dalam upaya rencana pemanfaatannya. Bangunan tersebut rencananya akan digunakan sebagai penginapan melihat kunjungan ke Geopark cukup tinggi. Begitu pula dengan bangunan bekas kantor kecamatan Karangsambung yang diminta oleh desa sampingnya, bangunan tersebut tetap dikelola oleh pemerintah daerah dan nantinya akan dipaparkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten sebagai lokasi pengembangan Geopark.

- d. Berkaitan dengan tanah kosong tersebut, hingga saat ini masih ada permasalahan. Panitia pembelian kurang cermat saat pembelian dan baru diketahui setelahnya jika terdapat 2 sertifikat dari 8 sertifikat hak milik yang tidak dapat dilakukan *splitsing*. Hal ini dikarenakan terdapat 1 sertifikat yang ternyata sudah dijualbelikan sebelum dibeli oleh pemerintah daerah. Usulan untuk pembangunan rumah sakit tipe D di atas tanah tersebut merupakan usul yang bagus. Usul ini akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan.

Analisis Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporan



Dedy Prayogi, S.E.
NIP 19880427 201101 1 005

FOTO KEGIATAN FORUM OPD BPKPD TAHUN 2025

